

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *AUDIT DELAY* PEMERINTAH PROVINSI DI PULAU SUMATERA

Kamilah Azhara¹⁾, Kartika Rachma Sari²⁾, Desi Indriasari³⁾

¹⁻³ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

*³⁾ Corresponden author: uno1.adies2@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Temuan Audit, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Audit Delay Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera. Populasi dalam penelitian ini yakni seluruh Provinsi di Pulau Sumatera. Teknik pengumpulan data menggunakan sampel jenuh dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan SPSS versi 29. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Temuan Audit dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Audit Delay. Sedangkan Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Audit Delay. Nilai Adjusted R² sebesar 0,137 berarti Temuan Audit, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh sebesar 13,7% terhadap Audit Delay dengan faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini sebesar 86,3% sisanya. Hasil penelitian dapat memberikan implikasi bahwa pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera harus lebih tepat waktu dalam menyusun laporan keuangan agar Audit Delay dapat diminimalisir.

Kata Kunci: *Audit Delay, Temuan Audit, Tingkat Ketergantungan Keuangan, dan Ukuran Pemerintah*

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of audit findings, the level of regional financial dependence, and the size of the local government on the audit delay of the provincial government on the island of Sumatra. The population in this study were all provinces on the island of Sumatra. The data collection technique uses a saturated sample where all members of the population are sampled. This study uses multiple regression analysis with SPSS version 29. The results revealed that Audit Findings and the Level of Regional Financial Dependence had a negative effect on Audit Delay. Meanwhile, Local Government Size has no effect on Audit Delay. The Adjusted R² value of 0.137 means that Audit Findings, Regional Financial Dependency Level, and Local Government Size have an effect of 13.7% on Audit Delay with other factors not covered in this study amounting to the remaining 86.3%. The results of the study can provide implications that the Provincial government on the island of Sumatra must be more timely in preparing financial reports so that Audit Delay can be minimized.

Keywords: *Audit Delay, Audit Findings, Level of Local Financial Dependency, and Local Government Size*

1. PENDAHULUAN

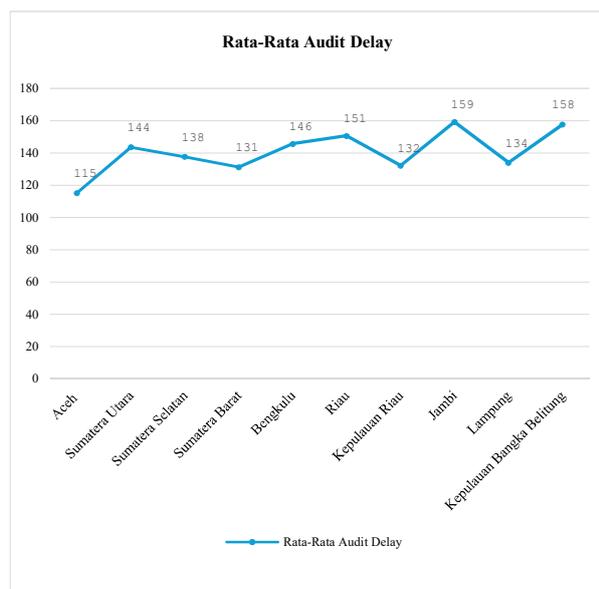
Sebagai bagian dari tugasnya di bawah pengelolaan keuangan daerah, Pemda menyusun LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah), mencakup perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran. Laporan keuangan dipakai dalam menentukan angka sumber daya ekonomi yang digunakan dalam mengoperasikan kegiatan pemerintah, mengukur nilai kondisi keuangan, mengukur efisiensi, efektivitas sebuah entitas pelaporan, dan menilai kepatuhan pada peraturan yang berlaku. Laporan disusun dengan

tujuan memberikan informasi tentang entitas yang akan berfaedah bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi akuntabilitas dan membentuk keputusan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 71 Tahun 2010, laporan sebaiknya memiliki karakter kualitatif relevan, handal, bisa dimengerti dan dibandingkan. Informasi dalam laporan dianggap relevan jika dapat memengaruhi keputusan pengguna dalam menilai peristiwa masa lalu, saat ini, dan masa depan, serta memperkuat atau mengoreksi hasil evaluasi yang

telah dilakukan pada masa lalu. Untuk memastikan bahwa informasi dalam laporan keuangan pemerintah berpengaruh dalam pengambilan keputusan, maka semua informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara lengkap dan tepat waktu.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 1 ayat (3) disebutkan laporan keuangan telah dipersiapkan Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan disampaikan bupati/walikota dan gubernur kepada BPK dilakukan selambatnya 3 bulan sejak berakhir tahun anggaran. Undang-Undang RI mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara No. 15 Tahun 2004 pasal 17 ayat (1) dan (2), menjelaskan BPK harus menyerahkan LHP atau Laporan Hasil Pemeriksaan terkait LKPD ke DPRD dua bulan paling lambat sejak menerima LKPD pemerintah daerah yang belum diaudit sehingga total waktu yang dibutuhkan untuk menyusun LKPD adalah lima bulan. Berdasarkan informasi didalam LHP BPK RI tahun 2018-2022 masih terdapat banyak keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh pemerintah daerah, penyampaian laporan yang terlambat menandakan adanya kesalahan pada laporan sehingga memerlukan waktu lebih lama dan menyebabkan informasi yang ada dalam laporan keuangan tidak mencerminkan situasi terkini.

Pada gambar dibawah dapat dilihat rata-rata *Audit Delay* yang berlangsung di Pemerintah Provinsi Pulau Sumatera.



Sumber: LHP BPK RI tahun 2018-2022

Gambar 1. Rata-Rata *Audit Delay* Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera

Dari Gambar tentang laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, maka terlihat rata-rata *Audit Delay* yang bervariasi dari seluruh pemerintah provinsi yang ada di Pulau Sumatera tahun anggaran 2018-2022. *Audit Delay* paling lama terjadi pada Pemerintah Provinsi Jambi yaitu sebanyak 159 hari, sedangkan *Audit Delay* yang paling cepat terjadi di Pemerintah Provinsi Aceh yaitu selama 115 hari. Rata-rata *Audit Delay* Pulau Sumatera tahun anggaran 2018-2022 yaitu sebesar 141 hari.

Terdapat faktor yang memengaruhi *Audit Delay*, yakni Temuan Audit, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Ukuran Pemerintah Daerah. Temuan audit adalah masalah yang ditemukan auditor di lapangan dalam LHP yang diaudit oleh BPK. Temuan meliputi penyimpangan oleh pemerintah daerah mengenai standar yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan. Waktu yang diperlukan dalam menyiapkan laporan audit dipengaruhi jumlah Temuan Audit.

Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah mencerminkan potensi daerah dalam mendanai kegiatan pembangunan dengan melakukan optimalisasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingkat ketergantungan ini mengindikasikan sejauh mana pemda tergantung pada Pemerintah Pusat untuk pendanaan pembangunan (Gemilang & Pramita, 2021).

Ukuran Pemerintah Daerah ialah gambaran seberapa luas pemerintahan sebuah daerah dapat diukur berdasarkan total aset. Jumlah aset yang dipakai bisa diamati melalui neraca laporan keuangan yang dipublikasikan setiap pemerintah daerah.

Terdapat perbedaan terhadap hasil penelitian tentang faktor yang memengaruhi *Audit Delay*, seperti penelitian (Gemilang & Pramita, 2021) dan (Wafa & Nugraeni, 2018) mengungkapkan Temuan Audit berpengaruh positif dan signifikan pada *Audit Delay* karena bertambahnya temuan audit akan meningkatkan waktu dalam melakukan proses pemeriksaan dan *Audit Delay* akan semakin lama. Berbeda dengan penelitian (Rahmawati & Verawaty, 2021) dan (Rachmawi et al., 2016), mengungkapkan Temuan Audit berpengaruh negatif dan signifikan pada *Audit Delay*, karena adanya banyak Temuan Audit pada tahun sebelumnya memberikan gambaran yang dapat mempercepat penyelesaian laporan keuangan. Sedangkan, penelitian (Ramadhani et al., 2022), mengatakan bahwa Temuan Audit tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay* karena tingkat Temuan Audit yang tinggi pada

pemerintah daerah tidak selalu berhubungan dengan jumlah waktu yang diperlukan untuk penyelesaian proses audit.

Penelitian oleh (Rahmawati & Verawaty, 2021) dan (Tullah et al., 2019), mengungkapkan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay* karena ketergantungan yang lebih besar pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat dapat mengurangi kemungkinan *Audit Delay*. (Gemilang & Pramita, 2021), menerangkan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay* karena masing-masing pemda mempunyai tingkat kesadaran sama kepada peraturan pemerintah untuk tepat waktu dalam menyampaikan laporan.

Penelitian yang dilakukan (Wafa & Nugraeni, 2018), dan (Erniza et al., 2015), menerangkan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada *Audit Delay*, karena semakin besar aset pemerintah daerah akan memerlukan waktu lebih lama dalam mengumpulkan data-data aset secara menyeluruh sehingga *Audit Delay* semakin lama. (Hardini & Sukirman, 2016), mengatakan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif dan signifikan kepada *Audit Delay* karena ukuran pemerintah besar tidak sepenuhnya memperpanjang waktu pembuatan dan pengajuan laporan. Penelitian (Rahmawati & Verawaty, 2021), (Gemilang & Pramita, 2021), Karlina et al., 2018), (Itsniawan & Suranta, 2015), (Bakar & Arza, 2019), (Vanesha & Syofyan, 2020), (Ramadhani et al., 2022), (Tullah et al., 2019), (Nugraha & Zulfikar, 2023), menyatakan Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay* karena besar kecilnya Ukuran Pemerintah Daerah bukanlah alasan untuk tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan.

Beberapa fenomena *Audit Delay* pada Pemerintah di Pulau Sumatera yang masih menghadapi keterlambatan dalam mengeluarkan LHP atas LKPD menjadi pertimbangan untuk melakukan penelitian terkait *Audit Delay* yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor penyebab *Audit Delay*. Penelitian ditujukan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera guna memperbaiki kinerja agar LKPD bisa disampaikan tepat waktu dan relevan. Berdasarkan latar belakang masalah, sehingga mendorong penulis untuk meneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi *Audit Delay* Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera. Peneliti bertujuan melakukan penelitian dengan judul

“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera”.

2. TELAAH LITERATUR

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency Theory oleh (Jensen & Meckling, 1976) menggambarkan keterkaitan agen dan prinsipal. Kaitan keagenan ialah sebuah kontrak seseorang atau lebih (*principal*) mengatur orang lain (*agent*) dalam melaksanakan sesuatu atau mengelola sumber daya untuk kepentingan prinsipal serta berwenang pada agen dalam membuat hasil yang baik untuk prinsipal. Dalam konteks pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi bertindak sebagai agen dan rakyat yang diwakili oleh anggota dewan (DPRD) berperan sebagai prinsipal. DPRD yang berfungsi sebagai gambaran prinsipal keterwakilan rakyat, bertanggung jawab atas pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan tersebut. Pemerintah Provinsi harus menyelesaikan serta menyerahkan laporan pertanggungjawaban selama satu tahun anggaran berupa LKPD, sedangkan DPRD selaku prinsipal memiliki tugas yaitu mengawasi kinerja pemerintah daerah provinsi. Ketepatan penyampaian laporan keuangan merupakan tanggung jawab pemda.

2.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut (Stanley Milgram, 1963), *Compliance Theory* yang juga dikenal sebagai "Teori Kepatuhan" menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang mematuhi aturan atau perintah yang telah ditetapkan. Teori Kepatuhan bisa mendukung seseorang dalam mematuhi peraturan. Dalam konteks Teori Kepatuhan ini, pemerintah daerah berusaha mematuhi peraturan perundang-undangan untuk mengurangi jumlah pelanggaran yang dilakukan selama proses audit. Teori Kepatuhan mendorong pemerintah untuk mempublikasikan laporan keuangan tepat waktu.

2.3 *Audit Delay*

Audit Delay adalah periode yang dihabiskan dalam penyelesaian audit laporan keuangan tahunan yang diperhitungkan sesuai total hari yang digunakan dalam menghasilkan LKPD, sejak tanggal tutup buku pada 31 desember sampai laporan audit BPK dipublikasikan. UU No. 1 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan menerangkan periode untuk menyerahkan laporan

keuangan ke BPK selambatnya 3 bulan sejak berakhirnya tahun anggaran untuk dilakukan pengecekan. Selanjutnya, diberikan waktu setelah dua bulan laporan keuangan Pemda disampaikan LHP LKPD yang telah diaudit oleh BPK kepada DPRD sehingga total waktu yang dihabiskan dalam menyampaikan laporan yaitu selama 5 bulan.

Keterlambatan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah terjadi akibat penyajian laporan yang melampaui waktu yang ditentukan sehingga dapat mengurangi relevansi informasi keuangan untuk pengambilan keputusan karena informasi tersebut menjadi tidak relevan atau tidak mencerminkan situasi keuangan terkini.

2.4 Temuan Audit

Temuan Audit umumnya didasarkan pada bukti pelanggaran oleh suatu daerah terhadap aturan pengendalian intern dan undang-undang yang berlaku dalam LKPD. Temuan Audit dapat menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian dalam laporan keuangan. Ketidaksesuaian tersebut dapat berupa penyimpangan yang ditunjukkan oleh bukti objektif atas standar audit yang harus ditetapkan oleh auditor dalam investigasi yang dilakukan untuk menentukan secara tepat standar audit yang dilanggar dan membuat saran untuk perbaikan sehingga dapat mengurangi temuan audit.

2.5 Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah menggambarkan seberapa pemda bergantung pada Pemerintah Pusat untuk mendanai pembangunan (Gemilang & Pramita, 2021). Dengan membandingkan total penerimaan transfer yang diterima oleh pemda dengan total pendapatan daerah, dapat menghitung Rasio Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah (Mahmudi, 2016:140). Semakin tinggi perbandingan, semakin besar pula Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Pusat.

2.6 Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran Pemerintah Daerah adalah besarnya kepemilikan total aset, dimana pemerintah dengan aset yang lebih besar cenderung melaporkan lebih cepat dibandingkan dengan pemerintah yang memiliki aset lebih kecil (Bakar & Nugraeni, 2019). Dalam penelitian ini menggunakan total aset untuk mengukur indikator Ukuran Pemerintah Daerah.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan menggunakan pendekatan asosiatif kausal dan menggunakan data sekunder. Metode penelitian ini dipilih untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi *Audit Delay* laporan keuangan pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan terhadap anggaran tahun 2018-2022 pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera yang berjumlah 10 Provinsi.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel dependennya yaitu *Audit Delay*, sedangkan variabel independennya yaitu Temuan Audit, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Ukuran Pemerintah Daerah.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi berupa 10 Provinsi di Pulau Sumatera. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh dimana 10 Provinsi di Pulau Sumatera dijadikan sampel.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi pada LHP LKPD Provinsi di Pulau Sumatera tahun anggaran 2018-2022. Data LHP LKPD diperoleh dengan mengakses laman *website* E-PPID Pusat BPK RI.

3.6 Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Data yang dikumpulkan akan diolah dengan program SPSS *versi* 29.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X ₁	50	8	41	20,06	7,755
X ₂	50	,35	1,00	,6320	,13760
X ₃	50	29,08	31,19	30,1774	,68888
Y	50	103	187	143,98	21,426
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Data diolah, Output SPSS 29 (2024)

Berdasarkan tabel hasil statistik deskriptif diperoleh:

1. Variabel Temuan Audit (X_1) Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera tahun anggaran 2018-2022 yang tertinggi diperoleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2020 sebesar 41. Sedangkan nilai terendah diperoleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2020.
2. Variabel Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah (X_2) Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera tahun anggaran 2018-2022 yang tertinggi diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2019 dan 2020 sebesar 1,00. Sedangkan nilai terendah diperoleh Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2020 sebesar 0,35.
3. Variabel Ukuran Pemerintah Daerah (X_3) Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera tahun anggaran 2018-2022 yang tertinggi diperoleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2022 sebesar 31,19. Sedangkan nilai terendah diperoleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2018 sebesar 29,08.
4. Variabel *Audit Delay* (Y) Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera tahun anggaran 2018-2022 yang tertinggi diperoleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung tahun anggaran 2019 dan 2022 sebesar 187 hari. Sedangkan nilai terendah diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 sebesar 103 hari.

4.1.2 Uji Asumsi Klasik

4.1.2.1 Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

		Unstandarized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	18,7757188
		4
Most Extreme Differences	Absolute	,099
	Positive	,099
	Negative	-,062
Test Statistic		,099
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e		,255
99% Confidence Interval	Lower Bound	,244
	Upper Bound	,267

Sumber: Data diolah, Output SPSS 29 (2024)

Hasil uji menyatakan nilai signifikansi sebesar 0,200. Berdasarkan uji normalitas ini, karena nilai signifikansi yang diuji > 0,05, dapat disimpulkan bahwa data yang diuji normal distribusinya.

4.1.2.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X_1	,951	1,051
	X_2	,998	1,002
	X_3	,951	1,052

Sumber: Data diolah, Output SPSS 29 (2024)

Hasil perhitungan uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogrov-Smirnov*. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa data yang dipakai penelitian terbebas dari gejala multikolinearitas. Hal tersebut dapat dilihat bahwa semua variabel independen penelitian mempunyai nilai *Tolerance* > 0,10 atau *VIF* < 10.

4.1.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	-27,113	71,344			-,380	,706
X_1	-,298	,192	-,229		-1,556	,127
X_2	-,045	,972	-,007		-,046	,963
X_3	1,590	2,389	,098		,666	,509

Sumber: Data diolah, Output SPSS 29 (2024)

Dari uji heteroskedastisitas dapat diamati seluruh nilai signifikansi setiap variabel yakni > 0,05, bisa ditarik kesimpulan model regresi tidak bergejala heteroskedastisitas.

4.1.2.4 Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,435 ^a	,189	,137	19,378	2,129

Sumber: Data diolah, Output SPSS 29 (2024)

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai Durbin-Watson sebesar 2,129 dengan nilai dU sebesar 1,6739. Nilai dU diperoleh dari tabel Durbin-Watson dengan cara melihat derajat kesalahan (α) 5% sampel yang diuji sebanyak 50 unit pengamatan, dan variabel independen sebanyak 3 variabel sehingga didapat nilai dU yaitu 1,6739.

Nilai 4-dU hasilnya adalah 2,3261 sehingga data penelitian telah bebas autokorelasi atau data sudah lolos uji autokorelasi karena $dU < d < (4-dU)$, yakni $1,6739 < 2,129 < 2,3261$.

4.1.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	255,565	123,076		2,076	,043
	X ₁	-,702	,331	-,289	-2,125	,039
	X ₂	-3,653	1,677	-,289	-2,178	,035
	X ₃	-3,120	4,121	-,103	-,757	,453

Sumber: Data diolah, Output SPSS 29 (2024)

Berdasarkan tabel diatas maka didapatkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 255,565 - 0,702X_1 - 3,653X_2 - 3,120X_3 + e$$

Koefisien beta untuk Temuan Audit (X₁) adalah -0,702. Hal ini berarti bahwa kenaikan 1% Temuan Audit akan mengakibatkan penurunan sebesar 0,702 pada *Audit Delay* (Y). Koefisien beta Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah (X₂) pada *Audit Delay* (Y) adalah sebesar -3,653 sehingga apabila Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah mengalami kenaikan 1% maka *Audit Delay* (Y) akan memperoleh penurunan sebesar 3,653. Ukuran Pemerintah Daerah (X₃) memiliki nilai koefisien beta sebesar -3,120 sehingga kenaikan 1% Ukuran Pemerintah Daerah (X₃) sehingga *Audit Delay* (Y) akan memperoleh penurunan sebesar 3,120. Nilai *error term* diperoleh dari $1 - 0,137$ yaitu 0,863 atau sebesar 86,3% faktor *Audit Delay* dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.1.4 Uji Hipotesis

4.1.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,435 ^a	,189	,137	19,378	2,129

Sumber: Data diolah, Output SPSS 29 (2024)

Hasil uji koefisien determinasi menyatakan nilai *Adjusted R²* sebesar 0,137 sehingga dapat diartikan sebesar 13,7 % faktor-faktor dari *Audit Delay* bisa dijelaskan variabel Temuan Audit, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Ukuran Pemerintah Daerah. Sementara sisanya

yaitu 86,3% dijelaskan variabel lainnya yang tidak dimuat pada penelitian ini.

4.1.4.2 Uji t

Tabel 8. Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	255,565	123,076		2,076	,043
	X ₁	-,702	,331	-,289	-2,125	,039
	X ₂	-3,653	1,677	-,289	-2,178	,035
	X ₃	-3,120	4,121	-,103	-,757	,453

Sumber: Data diolah, Output SPSS 29 (2024)

Hasil uji t dengan nilai t_{tabel} sebesar 2,013 adalah sebagai berikut:

- Hasil uji t Temuan Audit (X₁) diperoleh nilai t_{hitung} yaitu sebesar -2,125 > t_{tabel} yaitu 2,013 dan nilai signifikansi sebesar 0,039 < 0,05, maka hipotesis diterima. Artinya variabel Temuan Audit berpengaruh terhadap *Audit Delay* Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera.
- Hasil uji t Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah (X₂) didapatkan nilai t_{hitung} -2,178 > t_{tabel} yaitu 2,013 dan nilai signifikansi sebesar 0,035 < 0,05, maka hipotesis diterima. Artinya variabel Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap *Audit Delay* Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera.
- Hasil uji t Ukuran Pemerintah Daerah (X₃) didapat nilai t_{hitung} -0,757 < t_{tabel} yaitu 2,013 dan nilai signifikansi 0,453 > 0,05, maka hipotesis ditolak. Berarti variabel Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay* Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera.

4.1.4.3 Uji F

Tabel 9. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	4038,227	3	1346,076	3,585	,021 ^b
Residual	17273,853	46	375,519		
Total	21312,080	49			

Sumber: Data diolah, Output SPSS 29 (2024)

Hasil yang diperoleh untuk F_{tabel} yaitu sebesar 2,807 (dapat dilihat pada tabel uji F). Dikarenakan $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($3,585 > 2,807$), maka H₄ diterima. Jadi dapat dinyatakan bahwa Temuan Audit, Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Ukuran Pemerintah Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Audit Delay*.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Temuan Audit terhadap *Audit Delay*

Berdasarkan hasil uji t, bisa dilihat Temuan Audit mempunyai koefisien regresi negatif yakni $-0,702$ dan nilai signifikansi $0,39 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-2,125 > 2,013$ dapat disimpulkan variabel Temuan Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Audit Delay* sehingga **H₁ diterima**.

Hal ini selaras dengan penelitian (Rahmawati & Verawaty, 2021) dan (Rachmawi et al., 2016) yang mengatakan Temuan Audit berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*. Bertambahnya Temuan Audit tidak hanya mendukung pemerintah daerah agar segera menangani temuan tersebut, tetapi juga memperbaiki kesalahan yang telah ditemukan dan membantu mencegah terjadinya kesalahan serupa di periode berikutnya.

Penelitian (Wafa & Nugraeni, 2018) dan (Gemilang & Pramita, 2021) berbeda dengan penelitian ini menerangkan Temuan Audit berpengaruh positif terhadap *Audit Delay*. Jumlah Temuan Audit yang banyak akan memperpanjang waktu pemda dalam memberikan tanggapan atas temuan tersebut. Penelitian (Ramadhani, 2022), mengatakan Temuan Audit tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*. Ini terjadi akibat dari variabel yang hanya diukur berdasarkan jumlah kasus dalam audit yang tidak memberikan gambaran tentang kondisi sebenarnya.

4.2.2 Pengaruh Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap *Audit Delay*

Berdasarkan hasil uji t, dapat dilihat Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah mempunyai koefisien regresi negatif yaitu $-3,653$ dan signifikansi $0,035 < 0,05$, sementara $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-2,178 > 2,013$ maka bisa disimpulkan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Audit Delay*, maka **H₂ diterima**.

Selaras dengan penelitian (Tullah et al., 2019) dan (Rahmawati & Verawaty, 2021), menjelaskan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang menerapkan sanksi yaitu menunda pemberian bantuan ke pemerintah daerah ketika daerah tersebut telat dalam penyampaian laporan sehingga mendorong pemerintah daerah yang mempunyai ketergantungan besar pada bantuan

pusat untuk berusaha lebih keras dalam mematuhi peraturan yang berlaku dan memastikan laporan keuangan disampaikan tepat waktu yang menyebabkan *Audit Delay* berkurang.

Tidak sejalan dengan penelitian (Gemilang & Pramita, 2021), menerangkan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*. Setiap pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan Pemerintah Pusat terutama dalam penyampaian laporan keuangan.

4.2.3 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap *Audit Delay*

Berdasarkan hasil uji t, dapat dilihat Ukuran Pemerintah Daerah mempunyai koefisien regresi negatif yakni $-3,120$ dan nilai signifikansi $0,453 > 0,05$, sementara $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,757 < 2,013$ jadi disimpulkan Ukuran Pemerintah Daerah tidak mempengaruhi *Audit Delay* sehingga **H₃ ditolak**.

Selaras dengan penelitian (Rahmawati & Verawaty, 2021), (Gemilang & Pramita, 2021), (Itsniawan & Suranta, 2015), (Nugraha & Zulfikar, 2013), (Karlina et al., 2018), dan (Vanesha & Syofyan, 2020), menerangkan Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*. Ukuran pemerintah tidak dapat menjadi acuan untuk menentukan lama tidaknya *Audit Delay*. Baik pemda yang memiliki total aset besar maupun yang memiliki jumlah aset kecil menghadapi tuntutan yang sama dalam menyerahkan laporan tepat waktu ke BPK.

Penelitian ini tidak mendukung penelitian (Wafa & Nugraeni, 2018) dan (Erniza et al., 2015), mengatakan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap *Audit Delay*. Pemerintah dengan aset besar akan menghadapi *Audit Delay* yang lebih panjang. Hal ini berkaitan pada peningkatan total transaksi keuangan di wilayah tersebut. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh (Hardini & Sukirman, 2016), menjelaskan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*. Ini menunjukkan bahwa lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tidak selalu meningkat oleh ukuran pemerintah yang besar. Ukuran pemerintah yang besar ketika didorong sistem manajemen yang efektif mampu mempercepat proses penyusunan laporan keuangan dan mampu mengurangi terjadinya *Audit Delay*.

5. SIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan:

1. Temuan Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Audit Delay*.
2. Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Audit Delay*.
3. Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*.

5.2 Saran

1. Keterbatasan penelitian ini adanya Adjusted R² yang rendah hanya bisa menjelaskan 13,7% dan sisanya 86,3% dijelaskan oleh variable lainnya yang tidak termasuk sehingga disarankan agar dapat mengembangkan variabel independen yang diduga mempengaruhi *Audit Delay* pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera.
2. Periode yang dipakai dalam penelitian yaitu 5 tahun dimulai dari tahun anggaran 2018-2022 sehingga disarankan untuk menambah jangka waktu penelitian guna meningkatkan keterbaruan penelitian.
3. Disarankan untuk menggali lebih banyak referensi pustaka, baik yang bersumber dari buku maupun artikel.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Bakar, M. P., & Arza, F. I. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan Leverage terhadap *Audit Delay* (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1168–1183.
- Erniza, D., Zaitul, Z., & Yunilma, Y. (2015). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, dan Opini Audit terhadap Audit Report Lag (Pada Pemerintah Daerah Kepulauan Sumatera). *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 6(1), 1-15.
- Gemilang, Y. A. K., & Pramita, Y. D. (2021). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan Temuan Audit terhadap Audit delay. *Borobudur Accounting Review*, 1(1), 78–88.
- Hardini, Z. G., & Sukirman, S. (2016). Analisis Determinan Audit Delay pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1-8.
- Itsniawan, A. M., & Suranta, S. (2015). Audit Report Lag pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *SNEMA-2015. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Karlina, K., Lindrianasari, L., & Gamayuni., R. R. (2018). Determinant Analysis of Audit Report Lag in Regional Governments in Indonesia. *International Journal Of Scientific & Technology Research*, 7(4), 105-110.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga.
- Milgram, S. (1963). Behavioral Study Of Obedience. *Journal of Abnormal and Social Psychology*. 67(4), 371-378.
- Nugraha, R. D. E. S., & Zulfikar, Z. (2023). The Effect of SKPD Complexity, Government Size, Budget Absorption, and Audit Opinion on *Audit Delay* in Central Java Province Government in 2017-2021. *The International Journal of Business Management and Technology*, 7(1), 858-867.
- Rachmawi, S., Rini, R., & Fitri, Y. (2016). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9(1), 143-160.
- Rahmawati, R., Verawaty, V. (2021). Analisis Determinan *Audit Delay* of Government Financial Report pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Global Competitive Advantage-6*. 616-625.
- Ramadhani, D. T., Sulaiman, S., & Nurhasanah, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* pada

Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.
COMSERVA Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2(4), 286–296.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. DPR RI. Jakarta.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. DPR RI. Jakarta.

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. DPR RI. Jakarta.

Tullah, D. S., Apriyanti, E., & Riyanti, F. (2019). Pengaruh Ukuran Daerah, Opini Audit dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap *Audit Delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia Periode 2015-2016. *Jurnal Profita*, 12(2), 171-185.

Vanessa, A., & Syofyan, E. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah, Opini Audit dan Terpilihnya Kembali Kepala Daerah Sebelumnya (Petahana) terhadap *Audit Delay* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode 2014-2018). *JEA Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3389-3404.

Wafa, Z., & Nugraeni, N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(1), 51-58.